



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT.BPR SARI DINARKENCANA
TAHUN 2023**

UMUM

Laporan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) / Tata Kelola dibuat untuk memenuhi kewajiban bank dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK NO. 4/POJK.03/2015 tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Kepatuhan penuh dalam pengelolaan perusahaan melalui Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) / Tata Kelola, menciptakan hubungan yang selaras antara perusahaan dan masyarakat.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin kompetitif

Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan dan didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Hal tersebut merupakan faktor utama yang mendasari keberhasilan suatu kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan berbagai entitas bisnis.

Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka kepercayaan serta keyakinan seluruh nasabah dan para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat.

BPR Sari Dinarkencana Kupang dalam peran nya sebagai salah satu lembaga intermediasi konvensional bertekad untuk menerapkan Tata Kelola perusahaan yang ideal yang mana harus didukung dengan berbagai unsur-unsur penting, meliputi

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

peran aktif seluruh manajemen bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang optimal.

Atas upaya peningkatan kinerja bank melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai nilai etika yang berlaku umum pada bank, maka seyogyanya prinsip prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik senantiasa diterapkan dalam mendukung terciptanya infrastruktur usaha yang kokoh, dimana Tata kelola yang baik dirasakan semakin sangat penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Ketahanan dan keberlanjutan usaha Perusahaan dicapai melalui pertumbuhan usaha yang didukung oleh pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang baik sesuai dengan prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

Untuk itu, agar dapat terlaksananya Tata Kelola yang baik, maka Bank wajib menerapkan 5(lima) unsur diatas tersebut dalam operasional sehari hari.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Prinsip kehati hatian dalam kegiatan bisnis setiap hari sesuai dengan nilai nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

A. Dasar dasar pelaksanaan kebijakan tata kelola perusahaan mengacu kepada :

1. UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang : Bank Perkreditan Rakyat.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang : Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat / BPR
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Desember 2020

B. Komitmen terhadap Tata Kelola PT. BPR Sari Dinarkencana Kupang.

PT. BPR Sari Dinarkencana senantiasa berusaha untuk mengelola setiap risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari prinsip prinsip dasar pelaksanaan dan penerapan GCG

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

Penguatan struktur pengendalian internal yang rencananya dilakukan secara terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan berbagai dampak tersebut.

Aktualisasi penerapan dan pelaksanaan GCG sebagai bagian dari proses internal yang dilakukan diharapkan dan diwajibkan melibatkan seluruh unsur stakeholders yaitu ; Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan.

Dengan demikian komitmen Penerapan Tata kelola tersebut bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam penerapan prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggung jawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness), dan kehati hatian dalam mengelola bank.
2. Meningkatkan Kinerja bank dan seluruh komponen di dalam nya
3. Meningkatkan pelayanan terhadap Stakeholder
4. Menarik dan menjaga minat dan kepercayaan nasabah.

Transparansi Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola yang baik pada sektor perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat, semakin dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya volume usaha dan semakin meningkat pula risikonya.

Untuk itu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan semua pelaku Jasa Keuangan termasuk didalam nya adalah BPR, untuk menerapkan Tata Kelola / GCG dalam operasional nya setiap hari, dengan menjalankan hal hal seperti dibawah ini :

1. Ketentuan Umum
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite (jika ada)
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Penilaian Sendiri
7. Laporan Penerapan Tata Kelola
8. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
9. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk didalam nya, Sistim Pengendalian Intern
10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
11. Rencana Bisnis BPR
12. Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

I. PENERAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Menunjuk penjelasan umum diatas, BPR Sari Dinarkencana akan melaporkan Pelaksanaan Tata Kelola yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang : Penerapan Tata Kelola, selama periode tahun 2019, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat / BPR, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Desember 2020, sebagai berikut :

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi PT BPR Sari Dinarkencana diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan .

Tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS.

a. Jumlah Komposisi Direksi

Sampai dengan awal bulan Oktober 2023, komposisi direksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang : Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 4 poin 2 sbb : "BPR yang memiliki Modal Inti kurang sari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi".

Komposisi Direksi terdiri dari Direktur Utama YMK dan Direktur Kredit yang telah diangkat dan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Direksi telah dinyatakan Lulus Fit And Proper Test sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, telah terjadi perubahan komposisi direksi dimana salah satu direksi yaitu Direktur Kredit mengundurkan diri. Sehingga posisi direksi hanya 1 (satu) orang.

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

Adapun Komposisi Direksi sampai dengan awal bulan Oktober 2023 adalah sbb :

| No | Informasi | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama | Lingkan Arina Mondolang |
| | NIK | 5371046910690002 |
| | Jabatan | Direktur Utama YMFK Akta nomor 37 tanggal 27 April 2020. Kemenkumham no AHU-AH.01.03.0203787 tanggal 29 april 2020 Masa Berlaku sejak jabatan sampai dengan saat ini. |
| Tugas dan tanggung jawab : | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan kepatuhan BPR terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan perundang undangan lainnya.2. Termasuk didalamnya serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistim dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan POJK dan perundang undangan lainnya serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan/ atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan / atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).3. Menyusun dan / atau mengkinikan pedoman kerja, sistim dan prosedur kepatuhan yang meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. Pihak pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi kepatuhanb. Standar prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Kewajiban bagi setiap satuan kerja untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan intern dan peraturan perundang-undangan• Kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan intern dengan peraturan perundang undangan terkini.c. Prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen terkait fungsi kepatuhan.d. Kode etik kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan lainnya.e. Alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Anggota Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) dengan anggota direksi lainnya.• Anggota Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) dengan Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani Fungsi Kepatuhan.• Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani Fungsi Kepatuhan dengan unit kerja lain.f. Ketentuan Intern terkait fungsi kepatuhan yang mengatur tugas dan tanggung jawab antar lain :<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang - undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan / atau keputusan yang menyimpang dari POJK dan perundang- undangan yang berlaku.• Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan .• Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seleuruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain.• Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.• Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR• Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi4. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank | | |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

5. Meminimalkan risiko kepatuhan bank
6. Memberikan perhatian sepenuhnya atas laporan hasil pemeriksaan intern dan ekstern serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan
8. Membawahkan fungsi Manajemen Risiko, APU PPT, Sumber DayaManusia dan Umum
9. Bertanggung jawab atas pelaksanaan supporting operasional, selain kredit.

| No | Informasi | Keterangan |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama | I Made Putra Djaja, SSI |
| | NIK | 5371021710680001 |
| | Jabatan | Direktur Kredit Akta nomor 37 tanggal 27 April 2020. Kemenkumham no AHU-AH.01.03.0203787 tanggal 29 April 2020 Masa Berlaku sejak jabatan sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 |

Tugas dan tanggung jawab :

1. Mengkoordinir tugas tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memberikan tugas dan pengarahan kepada bawahannya
2. Melaksanakan, monitoring, pengawasan dan bertanggung jawab atas :
 - a. Fungsi Marketing Kredit antara lain :
 - Memasarkan Kredit kepada calon debitur yang dianggap potensial, baik secara doot to door, melalui media elektronik ataupun melakukan presentasi di perusahaan / instansi pemerintah dan swasta
 - Meneliti / memeriksa permohonan kredit terkait kelengkapan persyaratan, sumber penghasilan, kemampuan bayar, tempat tinggal, karakter, identitas diri, keamanan pembayaran angsuran, cek fisik jaminan dan tafsiran harga.
 - b. Fungsi Administrasi Kredit, antara lain mrngadakan pengawasan terhadapkredit yang diberikan.
 - c. Fungsi Penagihan angsuran kredit, termasuk penagihan kredit bermasalah antara lain :
 - Menagih angsuran kredit baik melalui bendahara gaji maupun langsung kepada debitur yang bersangkutan.
 - Menagih kredit bermasalah baik melalui surat maupun kunjungan langsung kepada debitur atau ditempuh cara lain sesuai ketentuan Bank seperti Resheduling (Penjadwalan kembali), Reconditioning (persyaratan kembali) dan Restructuring (Penataan kembali).
 - Bertanggung jawab atas keamanan uang daam perjalanan.
3. Bertanggung jawab atas penurunan tingkat Kolektibilitas (kredit bermasalah) dan pencapaian target laba.
4. Melaksanakan tugas tugas lain yang dibebankan oleh Direktur Utama dan RUPS, demi kelancaraN Operasional dan Pengebangan kerja

b. Kriteria Anggota Direksi

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, Sekurang kurangnya mencakup:
 - a. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau;

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

- c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan;
 - d. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - g. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan
 - h. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
2. Kompetensi, mencakup :
- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan;
 - d. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet.
 - e. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - f. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan :

Direksi telah mengikuti Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh predikat kelulusan sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini :

Direksi PT BPR Sari Dinarkencana yang telah LULUS Fit and Proper Test

| No | Jabatan | Nama |
|----|---------------------|----------------------------|
| 1. | Direktur Utama YMFK | Lingkan A Mondolang, SE.MM |
| 2 | Direktur Kredit | I Made Putra Djaja, SSI |
| | | |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

d. Rangkap Jabatan Direksi :

Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, setiap anggota Direksi dilarang untuk rangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Anggota Direksi PT. BPR Sari Dinarkencana tidak memiliki rangkap jabatan diluar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang dalam peraturan perundangan.

Direksi PT BPR Sari Dinarkencana yang merangkap Jabatan

| No | Jabatan | Nama |
|----|---------------------|-----------|
| 1. | Direktur Utama YMFK | Tidak ada |
| 2. | Direktur Kredit | Tidak ada |

e. Training dan/atau Seminar yang diikuti Direksi

| No | Jenis Pelatihan/Sosialisasi | Penyelenggara | Peserta | Tanggal Pelaksanaan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Informasi Penyampaian Laporan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Profil Risiko BPR/BPRS. | OJK | 1. Dirut 2. Accounting 3. PE Kepatuhan | 03 Jan 23 |
| 2. | Sosialisasi SEOJK No. 12/SEOJK.03 / 2022 tentang Laporan Bulanan BPR. | OJK | 1. Dirut 2. Accounting 3. PE Kepatuhan | 12 Jan 23 |
| 3. | POC Lembaga Pengguna dengan Ditjen Dukcapil | OJK | 1. Dirut 2. CS 3. PE Kepatuhan | 01 Feb 23 |
| 4. | Webinar <i>Ideas Talks</i> Riset OJK Intitute Volume 3 Tahun 2023 | OJK & Perbarindo | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan | 09 Feb 23 |
| 5. | Webinar Sosialisasi Aplikasi Pelaporan <i>Online OJK</i> (APOLO) Modul Profesi Keuangan AP/KAP | OJK | 1. Dirut 2. Accounting 3. PE Kepatuhan | 14 Feb 23 |
| 6. | Webinar Sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) | BPJS Ketenagakerjaan | 1. Dirut 2. Accounting 3. PE Kepatuhan | 21 Feb 2023 |
| 7. | Petunjuk Teknis Pengisian Web Portal | Kementerian Dalam Negeri RI | 1. Dirut 2. CS | 22 Feb 2023 |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | Dirjen Kependudukan & Catatan Sipil | 3. PE Kepatuhan | |
| 8. | Webinar "The Role of Governance, Risk and Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance." | OJK | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan | 23 Feb 2023 |
| 9. | Analisa dan Penilaian Agunan | Microfinance Learning Centre | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan 3. AO/Sandro | 16 Maret 2023 |
| 10. | Sosialisasi Penerapan PNBP | Perbarindo, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan 3. CS | 20 Maret 2023 |
| 11. | Sosialisasi Laporan Tahunan LPS. | LPS | 1. Dirut 2. Accounting 3. PE Kepatuhan | 20 Maret 2023 |
| 12. | Standard Akuntansi Keuangan Entitas Privat | Pusat Pengembangan Kajian Profesi Indonesia (PPKPI) | 1. Dirut 2. Accounting | 04 April 2023 |
| 13. | Teknis Akses PNBP Dukcapil | Perbarindo Pusat | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan 3. CS | 04 April 2023 |
| 14. | Webinar "Mengatasi Tantangan dan Menghadapi Perubahan Dalam Sektor Jasa Keuangan." | OJK Institute | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan | 13 April 2023 |
| 15. | Webinar Audit Penerapan Manajemen Risiko | Microfinance Learning Centre (MLC) | 1. Komut 2. Komisaris 3. Dirut 4. Staff Accounting | 16 Mei 2023 |
| 16. | WEBINAR Pengenalan Single View (SCV) Kpd BPR BPRS | LPS PERBARINDO | 1. Komut 2. Direktur 3. Accounting 4. Staff SPI 5. PE Kepatuhan | 17 Mei 2023 |
| 17. | Webinar Sosialisasi BIK Tahun 2023 | PERBARINDO | 1. Dirut 2. | 30 Mei 2023 |
| 18. | Webinar Dampak Penerapan Cloud Computing di Industri Jasa Keuangan | OJK Institute | 1. Dir Kredit 2. PE Ops 3. PE Kepatuhan 4. AO Sandro | 08 Juni 2023 |
| 19. | How to Manage Climate-Related Risk in Banking Industri | OJK Institute | 1. Dirut 2. PE | 15 Juni 2023 |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | 3. Kepatuhan Audit Internal | |
| 20. | Sosialisasi Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan (Pembiayaan Perumahan Pekerja) | BPJS Ketenagakerjaan | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan/SDM 3. CS | 16 Juni 2023 |
| 21. | Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sharing Bandwith Perbarindo | Perbarindo Pusat | 1. PE Kepatuhan 2. CS 3. AO/Edgar (IT) | 21 Juni 2023 |
| 22. | Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan. | OJK Institute | 1. Komut 2. Komisaris 3. Dirut | 22 Juni 2023 |
| 23. | Zoom Rapat Pembahasan RPOJK dengan DPD | PERBARINDO | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan | 05 Juli 2023 |
| 24. | Webinar Sosialisasi POJK No. 8 Thn 2023 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT dan PPPSPM di SJK). | OJK | 1. Dir Kredit 2. Para PE 3. AI | 06 Juli 2023 |
| 25. | Webinar Manajemen Stress di Era Digital | OJK | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan 3. Accounting | 13 Juli 2023 |
| 26. | Live Streaming Youtube, Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis bagi LJK. | PERBARINDO | 1. Dirut 2. Para PE 3. Accounting 4. Audit Internal | 17 Juli 2023 |
| 27. | Pelaksanaan Kick Off Lapangan dan Pelaksanaan Survey Indeks Efektifitas Kinerja PPATK dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2023 kepada Pihak Pelapor | PPATK | 1. Dirut 2. Staff SPI 3. PE Kepatuhan | 25 Juli 2023 |
| 28. | Achieving Exponential Growth With Self-service Digital Transformation | PERBARINDO | 1. Dirut 2. Para PE | 26 Juli 2023 |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 29. | Credit Control and Monitoring | MLC | 1. Dirut 2. Staff Accountin | 27 Juli 2023 |
| 30. | Webinar Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Konfirmasi | OJK | 1. Dirut 2. Staff SPI | 01 Agustus 2023 |
| 31. | Webinar Waspada Modus Penipuan Gaya Baru. | OJK | 1. Dirut 2. Staff SPI | 03 Agustus 2023 |
| 32. | Webinar Hasil Rilis BPS (Badan Pusat Statistik) Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Tahun 2023. | LPS PERBARINDO | 1. Komisaris 2. Dirut 3. PE Kepatuhan 4. Staff SPI | 09 Agustus 2023 |
| 33. | Restrukturisasi Kredit : Aplikasi Metode Adendum dan Novasi Secara Taat Asas | Intersa | 1. Komisaris 2. Dirut 3. PR Kepatuhan 4. Marketing Kredit (Sandro) 5. Staff Accounting | 18 Agustus 2023 |
| 34. | Leadership in Changing Atmosphere | OJK Institute | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan | 24 Agustus 2023 |
| 35. | Sosialisasi Teknis Rencana Implementasi SCV kepada BPR – BPRS | LPS | 1. Dirut 2. Staff Accounting 3. Staff SPI | 24 Agustus 2023 |
| 36. | Enhancing Fiancial Performance Through Data Analytics. | OJK Institute | 1. Komisaris 2. Dirut 1. PE Kepatuhan | 31 Agustus 2023 |
| 37. | Rapat Umum Anggota Tahunan Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan 2023. | PERBARINDO LAPS | 1. Komisaris 2. Dirut 3. PE Kepatuhan 4. Staf SPI | 08 Sept 2023 |
| 38. | Penerapan Pencegahan Pendanaan Proliferasi senjata pemusnah massal dan pendanaan terorisme | OJK | 1. Dirut 2. Staff SPI 3. CS | 11 Sept 2023 |
| 39. | Gugatan Sederhana, Mekanisme & Efektifitasnya | P. Hadisaputro Law Office (PHLO) | 1. Komisaris 2. Dirut | 19 Sept 2023 |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| | Dalam Penagihan / Kredit Bermasalah | | 3. PE Kepatuhan | |
| 40. | POJK No. 19 tahun 2023 mengenai Pengembangan Kualitas SDM BPR dan BPRS SEOJK No. 11 tentang BMPK dan BMPD | OJK | 1. Dirut 2. SPI 3. Accounting | 06 Nop 2023 |
| 41. | Awarding Ceremony and Disiminasi Karisma OJKI Tahun 2023 | OJK Institute | PE Kepatuhan | 07 Nop 2023 |
| 42. | How to Drive Corporate Performance through Accounting Practices | OJK | SPI | 09 Nop 2023 |
| 43. | Sosialisasi Pembahasan Juknis ISO 27001:2022 Bersama Perbarindo | Perbarindo | 1. PE Ops 2. PE Kepatuhan 3. CS 4. AO (Sandro) | 17 Nop 2023 |
| 44. | Pelatihan Awareness ISO 27001:2022 | Perbarindo | 1. Tim SMKI, 2. SPI | 20 Nop 2023 |
| 45. | Mengenal lebih jauh pengaturan UU P2SK dalam rangka penguatan Literasi, Inklusi dan perlindungan konsumen. | OJK | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan 3. SPI 4. CS | 23 Nop 2023 |
| 46. | Focus Group Discussion (FGD Konsultasi Publik Taksonomi Berkelanjutan Indonesia | OJK | 1. Dirut 2. PE Kepatuhan 3. SPI | 28 Nop 2023 |
| 47. | Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023. | Perbarindo/Dukcapil | 1. CS 2. SPI | 29 Nop 2023 |
| 48. | Risk and Governance Summit 2023 | OJK | Direktur Utama | 30 Nov 2023 |
| 49. | Presentasi Komunal | Bank TLM | - Direktur Utama - SPI | 04 Des 2023 |
| 50 | Sosialisasi Enhancement Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SIPINA) – Modul CRI | OJK | - Dirut - SPI - CS | 13 Des 2023 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Catatan : Hampir semua pelatihan dilakukan secara daring

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

g. Rapat Direksi

Selama periode tahun 2023 direksi rutin mengadakan rapat bersama dengan komisaris dan seluruh PE serta bagian bagian terkait sesuai materi yang akan di bahas.

Rapat direksi seringkali diadakan dan dihadiri pula oleh komisaris sesuai dengan keputusan dalam Rapat Gabungan yang dihadiri oleh Pemegang Saham, komisaris, direksi dan PE, yang intinya meminta direksi dan komisaris melakukan rapat bersama guna membahas keadaan intern dan masalah bank berikut penyelesaiannya, dilakukan minimal 1 bulan 2 kali berlaku sejak September 2019,

| No | Nomor / Materi | Waktu | Peserta Rapat |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | Pembahasan mengenai Sanksi dan Denda keterlambatan dan Pulang Awal bagi karyawan/ti | 01-Feb-23 | Direksi, Para PE dan Karyawan/ti |
| 2. | Pembahasan mengenai Alternate Pegawai | 17-Feb-23 | Direksi, Para PE, Karyawan/ti |
| 3. | Sosialisasi Peraturan Perusahaan Tahun 2023 dan Alternate Pegawai | 19 Februari 2023 | Direksi, PE Ops, PE Kepatuhan, Staf SPI |
| 4. | Pembahasan tentang Ketentuan Uang Pisah dan Pembagian Jaspro 2022 | 06-Mar-23 | Komisaris, Direksi dan PE |
| 5. | Pembahasan usulan pengangkatan Sdri Christine sebagai Staff SPI | 27-Mar-23 | Komisaris, Direksi dan PE |
| 6. | Pembahasan mengenai Pra RUPS Luar Biasa dan Pengunduran Diri Direktur Kredit | 10-Apr-23 | Dewan Komisaris, Direksi dan PE |
| 7. | Pembahasan mengenai revisi RBB tahun 2023 | 12-Apr-23 | Dewan Komisaris, Direksi, Para Pemegang Saham |
| 8. | Pembahasan Evaluasi Kinerja BPR Sari Dinarkencana Bulan Juni 2023 | 25-Jul-23 | Dewan Komisaris, Direksi, Para Pemegang Saham |
| 9. | Pembahasan mengenai Pengunduran Diri Direktur Kredit | 18-Agu-23 | Dewan Komisaris, Direksi, Para Pemegang Saham |
| 10. | Pembahasan mengenai Dana Kepesertaan PT. Asuransi Jasaraharja Putera | 06-Sep-23 | Dewan Komisaris, Direktur Utama |
| 11. | Pembahasan mengenai Evaluasi Kinerja | 07-Sep-23 | Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham |
| 12. | Pembahasan mengenai Kewajiban dan Hak Direktur Kredit jika terjadi Pengunduran Diri dan Hal-hal yang dilakukan Pengurus ketika terjadi kekosongan Direktur Kredit. | 11-Sep-23 | Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham |
| 13. | Pembahasan mengenai Pengadaan Pakaian seragam baru bagi beberapa Karyawan/ti. | 29-Sep-23 | Komisaris, Direksi dan PE |
| 14. | Pembahasan hal-hal menyangkut penyimpanan dan penitipan kunci-kunci kantor, Tunjangan Pulsa Komisaris, Alternate Transfer gaji, dll Nasabah, Perubahan Jam Operasional Kantor dan Peminjaman Motor ke AO | 18-Okt-23 | Komisaris, Direksi dan PE |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

II. PENERAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT. BPR Sari Dinarkencana diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tugas dengan baik dan benar untuk kepentingan PT. BPR Sari Dinarkencana, serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*)

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang : Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 24 poin 2 sbb, BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah), wajib memiliki paling sedikit 2(dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Komposisi Anggota Komisaris PT. BPR Sari DinarKencana posisi akhir bulan Desember 2023 telah sesuai aturan pojk tentang Tata Kelola, yang telah diangkat dan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Komisaris telah dinyatakan Lulus Fit And Proper Test sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Dewan Komisaris PT. BPR Sari Dinarkencana Kupang

| No | Informasi | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama | Y Stephania de Rozari |
| | NIK | 5371046910690002 |
| | Jabatan | Komisaris Utama Risalah RUPS Nomor : 098/SARINA-KEPATUHAN/XII/21K tanggal 06 Desember 2021, keputusannya antara lain : Dewan komisari hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja an. Stephania de Rozari maka jabatannya otomatis adalah Komisaris, dan bersifat sementara. Apabila telah ada pengganti jabatan komisaris yang lowong, maka sdr. Stephania de Rozari dikembalikan ke jabatan semua yaitu Komisaris Utama. Akta Notaris Zantje M Voss Tomasowa, SH Mkn no. 38 tanggal 13 Desember 2021 Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.03.0486711 tanggal 16 Desember 2021 |
| Tugas dan Tanggung Jawab | | |
| 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | | |
| 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. | | |
| 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib | | |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

- mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
5. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
6. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
8. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

| No | Informasi | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2 | Nama | Luh Putu Martini |
| | NIK | 5371024503670006 |
| | Jabatan | Komisaris |
| 1. | Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | |
| 2. | Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. | |
| 3. | Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | |
| 4. | Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : | |
| 5. | penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan | |
| 6. | hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. | |
| 7. | Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. | |
| 8. | Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : <ol style="list-style-type: none">a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/ataub. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; | |

b. Kriteria Anggota Dewan Komisaris :

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

- 4 Dewan Komisaris harus Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan BPR.
- 5 Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat
- 6 Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- 7 Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut.
- 8 Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 9 Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi BPR, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha BPR, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.
7. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR sebelum menjalani masa tunggu selama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
8. Disamping itu, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan orang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BPR dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada BPR.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BPR, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali BPR.
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

- e. Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan :

Setiap anggota Dewan Komisaris diharuskan telah mengikuti Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa keuangan dan memperoleh predikat lulus.

BPR Sari Dinarkencana saat ini mempunyai 1 (satu) orang komisaris utama serta calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus Fit and Proper test oleh OJK masih menunggu RUPS guna mengesahkan jabatan komisaris. Adapun Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini dan yang masih menunggu RUPS Pengangkatan / pengesahan Komisaris dan telah dinyatakan lulus Fit and Proper Test adalah sebagai berikut :

Penilaian kepatutan Dewan Komisaris PT. BPR Sari Dinarkencana

| No | Jabatan | Nama | Predikat |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Komisaris Utama | Y Stephania de Rozari | Lulus sertifikasi & Fit and proper test |
| 2. | Komisaris | Luh Putu Martini | Lulus sertifikasi & Fit and proper test |

d. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris :

1. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Anggota dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan/atau Bank umum.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sari DinarKencana memiliki rangkap jabatan diluar perusahaan yang diperkenankan oleh peraturan yaitu :

Penilaian kepatutan Dewan Komisaris PT. BPR Sari Dinarkencana

| No | Jabatan | Nama | Rangkap Jabatan |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1. | Komisaris Utama | Y Stephania de Rozari | - |
| 2. | Komisaris | Luh Putu Martini | - |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

e. Training dan/atau Seminar yang diikuti Dewan Komisaris

| No | Jenis Pelatihan/Sosialisasi | Penyelenggara | Peserta | Tanggal Pelaksanaan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Standard Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) | DPD Perbarindo | 1. Kom-utama 2. Staff Acc | 05 Mei 2023 |
| 2. | Webinar Audit Penerapan Manajemen Risiko | Microfinance Learning Centre (MLC) | 1. Komut 2. Komisaris 3. Dirut 4. Staff Acc | 16 Mei 2023 |
| 3. | WEBINAR Pengenalan Single View (SCV) Kpd BPR BPRS | LPS PERBARINDO | 1. Komut 2. Direktur 3. Accouting 4. Staff SPI 5. PE Kep | 17 Mei 2023 |
| 4. | Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku "Indonesia Menuju 2025" OJK Institute Tahun 2023 | OJK | 1. Komisaris | 14 Agustus 2023 |
| 5. | Restrukturisasi Kredit : Aplikasi Metode Adendum dan Novasi Secara Taat Asas | Intersa | 1. Komisaris 2. Dirut 3. PE Kep 4. AO (Sandro) 5. Staff Acc | 18 Agustus 2023 |
| 6. | Enhancing Fiancial Performance Through Data Analytics. | OJK Institute | 1. Komisaris 2. Dirut 3. PE Kep | 31 Agustus 2023 |
| 7. | Rapat Umum Anggota Tahunan Lembaga Alternative Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan 2023. | PERBARINDO LAPS | 1. Komisaris 2. Dirut 3. PE Kepatuhan 4. Staf SPI | 08 Sept 2023 |
| 8. | Gugatan Sederhana, Mekanisme & Efektifitasnya Dalam Penagihan / Kredit Bermasalah | P. Hadisaputro Law Office (PHLO) | 1. Komisaris 2. Dirut 3. PE Kepatuhan | 19 Sept 2023 |
| | | | | |

III. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite(tidak ada komite)

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar) tidak wajib membentuk Fungsi Komite tetapi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

1. Fungsi Audit Internal
2. Fungsi Manajemen Risiko
3. Fungsi Kepatuhan

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

Berikut ini profil para Pejabat Eksekutif sebagai pelengkap pelaksana tugas komite pada BPR Sari Dinarkencana Kupang, sebagai berikut :

Nama dan Jabatan Pejabat Eksekutif

| No | Nama | Jabatan Lama | Jabatan Baru | Keterangan |
|----|------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Oktovianus Rembo | AO | PE Operasional | SK No. 031/SARINA-Kepatuhan/IV/22K tanggal 28 April 2022 Perihal : Pengangkatan PE Operasional |
| 2. | Musa Anderson Kaseh | - | PE Kepatuhan | SK No. 084/SARINA-Kepatuhan/XII/2022 tanggal 26 Des 2022 Perihal : Pengangkatan PE Kepatuhan |

IV. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan menggambarkan perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan / atau pihak terkait dengan bank. Misalnya memberikan hak istimewa kepada pihak pihak tertentu diluar dari prosedur/ aturan / SOP yang menimbulkan kerugian bank atau mengurangi keuntungan bank.

Untuk itu semua pihak seperti diatas, wajib menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan demi menghindari keputusan yang akan merugikan bank.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | | Pengambil Keputusan | | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rp) | Ket |
|----|------------------------------------------|---------|-----|---------------------|---------|-----|-----------------|-----------------------------|-----|
| | Nama | Jabatan | NIK | Nama | Jabatan | NIK | | | |
| | Tidak ada | - | - | - | - | - | - | - | - |

Cat. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

V. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, Berikut uraian tugas dan tanggung jawab serta fungsi audit intern.

a. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
 2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 5. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- b. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal, Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, independen terhadap fungsi operasional.

VI. Penerapan Manajemen Risiko termasuk didalamnya Sistem Pengendalian Intern

Dengan semakin berkembangnya usaha, meningkat pula kebutuhan masyarakat akan pinjaman dari bank, seiring meningkatnya Dana Pihak Ketiga yang dihimpun bank dan dengan menyadari perkembangan lingkungan eksternal dan internal maka muncul potensi kompleksitas resiko kegiatan usaha perbankan. Karenanya PT BPR Sari Dinarkencana menjalankan kebijakan untuk meminimalkan resiko dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko secara terukur.

Manajemen resiko dalam hal ini mencakup pengawasan aktif manajemen dalam penerapan sistem dan prosedur, penetapan limit transaksi dan pemanfaatan sistem informasi dan sistem pengendalian internal.

Sejalan dengan itu PT BPR Sari Dinarkencana melakukan pengendalian resiko antara lain terkait :

a. Resiko Kredit

1. Memantau progress dari suatu aplikasi kredit
2. Menganalisa secara cermat aplikasi kredit yang diajukan termasuk memanfaatkan penggunaan pusat data SID (Sistem Informasi Debitur) / SLIK
3. Melakukan pengikatan jaminan secara notarial
4. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian kredit bermasalah khususnya untuk kredit yang dikategorikan macet

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

b. Risiko Operasional

1. Menerapkan kebijakan pengendalian dengan pembatasan transaksi secara berjenjang
2. Peningkatan pengawasan internal secara efektif dan optimal

c. Risiko Kepatuhan

Memastikan bahwa bank mematuhi dan melaksanakan peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

1. Fungsi pengawasan Intern harus di tingkatkan guna mencegah terjadinya transaksi-transaksi atau langkah langkah yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin terhadap pelanggaran untuk dapat dilakukan pencegahan.
2. Tingkatkan kesadaran dan kewajiban menerapkan budaya kepatuhan, mencegah Pelanggaran kepatuhan oleh pemilik / pengelola bank /pejabat yang mungkin saja dilakukan, mengingat pengelola juga berpotensi menyalahgunakan jabatannya. Dalam struktur organisasi bank, Direktur Kredit dan 1 orang komisaris adalah PS (Pemegang Saham), sehingga budaya menanamkan Prinsip kehati-hatian dan melaksanakannya wajib dilakukan oleh pengelola dan seluruh karyawan.
3. Kecerobohan dalam pengelolaan bisnis , mengabaikan aspek aspek dalam peraturan dan perjanjian
4. Dan lain lain.

VII. Laporan Penerapan Tata Kelola

a. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris (sudah tertuang pada butir I)
2. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.(sudah tertuang pada butir II)
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite (apabila ada)
 - BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib membentuk paling sedikit: 1) Satuan Kerja Audit Intern; 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan 3) Satuan Kerja Kepatuhan
 - BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1) Fungsi Audit Intern; 2) Fungsi Fungsi Manajemen Risiko; dan 3) Fungsi Kepatuhan.

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

b. Kepemilikan saham Direksi :

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama & Jabatan | NIK | Nominal Rp. | Prosentase |
|----|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | Lingkan Arina Mondolang Direktur Utama YMFK | 5371046910690002 | Tidak ada saham | 0 |
| 2 | I Made Putra Djaja Direktur Kredit | 5371021710680001 | Rp. 600.000.000.- | 10% |

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain

| No | Nama & Jabatan | NIK | Nominal Rp. | Prosentase |
|----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| 1 | Lingkan Arina Mondolang Direktur Utama YMFK | 5371046910690002 | Tidak ada saham | 0 |
| 2 | I Made Putra Djaja Direktur Kredit | 5371021710680001 | Tidak ada saham | 0 |

c. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan / atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK | Hubungan Keuangan | | |
|----|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Lingkan Arina Mondolang- | 5371046910690002 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Made Putra Djaja | 5371021710680001 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | NIK | Hubungan Keluarga | | |
|----|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | Lingkan Arina Mondolang- | 5371046910690002 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Made Putra Djaja | 5371021710680001 | Tidak Ada | Ada | Ada |

3. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1. | Y Stephania de Rozari | 3674024407650003 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Luh Putu Martini | 5371024503670006 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

4. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1. | Y Stephania de Rozari | 3674024407650003 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Luh Putu Martini | 5371024503670006 | Tidak Ada | Ada | Ada |

d. Kepemilikan saham Dewan Komisaris**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | Mama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Nominal | Presentase Kepemilikan |
|----|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 1. | Y Stephania de Rozari | 3674024407650003 | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Luh Putu Martini | 5371024503670006 | Rp. 600.000.000.- | 10% |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain

| No | Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris | NIK | Sandi Bank lain | Nama Perusahaan lain | % Kepemilikan |
|----|-------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 1. | Y Stephania de Rozari | 3674024407650003 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Luh Putu Martini | 5371024503670006 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

e. Hubungan Keuangan dan / atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan / atau Pemegang Saham BPR**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1. | Y Stephania de Rozari | 3674024407650003 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Luh Putu Martini | 5371024503670006 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1. | Y Stephania de Rozari | 3674024407650003 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 2. | Luh Putu Martini | 5371024503670006 | Tidak Ada | Ada | Ada |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

f. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No | Jenis Remunerasi Dalam 1 (satu) Tahun | Direksi | | Komisaris | |
|----|---------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | Jumlah orang | Jmlh Keseluruhan (Rp) | Jumlah orang | Jmlh Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 248,000,000,- | 2 | 141,000.000.- |
| 2 | Tunjangan (perumahan) | 2 | 33.592.000- | 2 | 19.975.000.- |
| 3 | Tantiem | - | - | - | - |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | - | - | - | - |
| 5 | Remunerasi lainnya** | - | - | - | - |

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit) | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1 | Perumahan | 42,5% dari Gaji / 3 bulan | 42,5% dari Gaji / 3 bulan |
| 2 | Transportasi | - | - |
| 3 | BPJS Kesehatan | 4% dr gaji (beban Perusahaan) | 4% dr gaji (beban Perusahaan) |
| 4 | BPJS Tenaga Kerja | 6,24% dr gaji (beban perusahaan) | 6,24% dr gaji (beban perusahaan) |
| 5. | THR | 1 x Gaji | 1 x Gaji |

g. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah dalam Perbandingan

| Keterangan | Perbandingan | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | a/b | 1 |
| Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai terendah (b) | a. 5.000.000.- b. 2.039.500.- | 2,28 : 1 |
| Rasio Gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | a. 11.600.000.- b. 10.880.000.- | 1,07 : 1 |
| Rasio Gaji Anggota Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota komisaris yang terendah (b) | a. 6.000.000.- b. 5.750.000.- | 1,04 : 1 |
| Rasio Gaji Direksi Tertinggi (a) dan Gaji Anggota Dewan Komisaris Tertinggi (b) | a. 11.600.000.- b. 6.000.000.- | 1,93 : 1 |
| Rasio Gaji Anggota Direksi Tertinggi (a) dan Gaji Pegawai Tertinggi (b) | a. 11.600.000.- b. 5.000.000.- | 2,32 : 1 |

h. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

| No | Tanggal | Jmlh Peserta | Topik / Materi Pembahasan |
|----|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 06 Maret 23 | 5 | Agenda Pembahasan twntang Ketentuan Uang Pisah dan Pembagian Jaspro 2022. |
| 2 | 27 Maret 23 | 4 | Agenda Pembahasan Usulan Sdri Kristine Bana sebagai Staff SPI |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

| | | | |
|-----|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 10 April 23 | 4 | Agenda Pembahasan mengenai Pra RUPS Luar Biasa dan Pengunduran Diri Direktur Kredit. |
| 4 | 12 April 23 | 8 | Agenda Pebahasan mengenai Revisi RBB tahun 2023 |
| 5 | 25 Juli 23 | 9 | Agenda Evaluasi Kinerja BPR SDK nulan Juni 23 |
| 6 | 18 Agt 23 | 11 | Agenda Pembahasan mengenai Pengunduran diri Direktur Kredit |
| 7. | 06 Sep 23 | 4 | Agenda Pembahasan mengenai Dana Kebersertaan ass Jasa Rahardja Putra. |
| 8. | 07 Sep 23 | 8 | Agenda Evaluasi Kinerja |
| 9. | 11 Sep 23 | 8 | Agenda Pembahasan mengenai kewajiban dan Hak Direktur Kredit jika terjadi pengunduran diri dan hal hal yang dilakukan pengurus ketika terjadi kekosongan direktur kredit. |
| 10. | 19 Sep 23 | 4 | Agenda Pembahasan mengenai Pengadaan seragam |
| 11. | 18 Oct 23 | 4 | Agenda Pembahasan operasional kantor. |
| | | | |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | NIK | Frekwensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (%) |
|----|---------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | Y Stephania de Rozari | 3674024407650003 | Lbh dr 20 x kehadiran | 1 | 100% |
| 2. | Luh Putu Martini | 5371024503670006 | Lbh dr 20 x kehadiran | 0 | 100% |
| | | | | | |

i. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah Penyimpangan Internal dalam 1 Tahun | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan oleh : | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelum nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya | Tahun Laporan | Tahun Sebelum nya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada |
| Telah diselesaikan | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada |
| Dalam Proses Penyelesaian | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada |

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Belum diupayakan penyelesaiannya | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada |
| Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada | Tdk Ada |

j. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum | Jumlah (Satuan) | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan Hukum yang Tetap) | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Dalam Proses Penyelesaian | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Total | | |

k. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | | Pengambil Keputusan | | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi | Ket |
|----|------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| | Nama | jabatan | NIK | Nama | jabatan | NIK | | | |
| | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | |

l. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1 | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

VIII. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PT. BPR Sari DinaKencana telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar, dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 disebutkan bahwa jumlah modal sebesar +/- Rp. 9,4 Milyar, sehingga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Terkait dengan bank adalah sebesar 10% dari jumlah modal adalah BMPK maksimal sebesar +/- Rp 940 juta, dan saat akhir tahun, BMPK Kredit untuk Pihak Terkait, Tidak melebihi BMPK

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

- b. Pihak Tidak Terkait dengan bank (Individu) adalah sebesar 20% dari jumlah modal adalah BMPK maksimal sebesar +/- Rp. 1,9 M Peminjam group/kelompok adalah sebesar 30% dari jumlah modal adalah BMPK maksimal sebesar +/- Rp. 2.8 M, dan bank tidak memberikan kredit melebihi BMPK yang telah ditetapkan.

IX. Rencana Bisnis BPR

Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Bank Tahun 2023 maka strategi dan kebijakan manajemen mencakup :

- a. Bidang Penghimpunan Dana :
 1. Komitmen masyarakat pengguna jasa untuk menempatkan dana pada Bank dalam bentuk Tabungan dan Deposito.
 2. Memberikan suku bunga yang bersaing dan pelayanan yang cepat dan tepat waktu
 3. Meningkatkan pangsa pasar pada daerah operasi, khususnya dalam usaha penetapan target dana
 4. Memperkenalkan tabungan dan deposito dikalangan pemerintah sentra bisnis seperti pasar, pusat keramaian dan sekolah sekolah.
 5. Memaksimalkan funding dengan memberdayakan seluruh karyawan / sdm yang ada untuk memasarkan produk tabungan, deposito.
 6. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan sistim Jemput Bola yang selama ini sudah berjalan.
 7. Memanfaatkan secara maksimal media social untuk memanfaatkan dan mempromosikan jasa bank.

- b. Bidang Penyaluran Kredit :

PT BPR Sari Dinarkencana dalam 33 tahun ini, lebih berorientasi memberikan kredit kepada PNS, yaitu kredit konsumtif, namun demikian sudah mulai dilakukan pemerataan antara kredit konsumtif dan produktif. Untuk sektor produktif bank mulai membiayai dari sektor usaha kecil.

Sehubungan dengan rencana ekspansi kredit produktif, dan penguatan funding guna memperoleh biaya dana murah untuk meminimize Over Head Cost, sehingga BLR yang diperoleh, akan bersaing dengan BPR lain dan diharapkan akan ada peningkatan volume kredit seperti yang menjadi harapan manajemen dan RUPS.

Dengan rencana ekspansi kredit baik kepada PNS, Peg BUMN, Swasta, sektor usaha untuk menambah modal kerja maupun untuk investasi, tidak serta merta hanya melempakan kredit guna mencapai target saja, namun

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

prinsip kehati hatian tetap menjadi acuan dalam ekspansi dan realisasi kredit.

Untuk mendukung pencapaian target di atas, maka langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain yaitu :

1. Fokus terhadap kredit dan core busines yang sudah berjalan yaitu pembiayaan kredit konsumtif kepada Pegawai Negeri bahkan harus ditingkatkan lagi dengan tetap berpegang teguh terhadap prinsip kehati hatian dan harus dimaintenance dengan baik
 2. Menambah prosentasi perencanaan pembiayaan kredit modal kerja dan investasi kepada pengusaha kecil terutama pangsa pembiayaan Pedagang kecil
 3. Bank akan memberi jaminan akses terus-menerus terhadap debitur lama dengan kualitas bagus (*long term relationship*).
 4. Mendorong pembayaran kembali kredit secara tepat waktu dengan insentif, pelayanan yang baik dan memuaskan serta pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan debitur.
 5. Bank memanfaatkan media social untuk memasarkan produk kredit serta menghimbau nasabah kredit untuk secara tertib melakukan pembayaran.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):
- Terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Bank telah melakukan pembaharuan dan pengisian Struktur Organisasi Perusahaan yaitu :
1. Bank masih kurang memenuhi kecukupan komposisi pengurus yaitu kekurangan 1(satu) orang anggota direksi. Bank sedang berupaya untuk mencari calon direksi namun sampai saat ini belum ada yang lulus dan memenuhi syarat dan criteria yang dibutuhkan. Bank tetap berupaya mencari calon direksi dimaksud.
 2. Masih terdapat kekurangan PE SPI, namun telah ditangani oleh staf SPI yang nantinya akan diangkat menjadi PE SPI.
 3. Terjadi rotasi dalam unit operasional guna penyegaran.
 4. Bank tetap memprioritaskan dan akan konsisten memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.
 5. Menerapkan reward dan punishment kepada seluruh karyawan

X. Penilaian Sendiri / Self Assessment

Berdasarkan Hasil Self Assesment posisi Tahun 2023, PT BPR Sari Dinarkencana memperoleh Nilai Komposit 1,95 degan Predikat BAIK, rincian

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Sari Dinarkencana

Tahun 2023

masing-masing faktor serta Nilai Komposit dari Hasil Self Assesment sebagai berikut :

| Faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nilai Komposit |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| Total Penilaian Faktor | 0,37 | 0,27 | 0,00 | 0,25 | 0,20 | 0,23 | 0,03 | 0,19 | 0,11 | 0,17 | 0,14 | 1,95 |
| Predikat Komposit | BAIK | | | | | | | | | | | |

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Saridinar Kencana tahun 2023 untuk periode penilaian 31 Desember 2023, yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 4/POJK.03/2015 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) serta perubahan ketentuan pelaporan sesuai SE OJK nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk itu BPR melaporkan Laporan Tata Kelola dimaksud berikut perubahan sesuai SE OJK 24/SEOJK.03/2020, sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk Pelaksanaan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Pertanggungjawaban dan Kewajaran BPR.

Kupang, 30 Januari 2024

PT BPR SARI DINARKENCANA,

Lingkan Arina Mondolang
Direktur



Y Stephania de Rozari
Komisaris Utama